

**ANALISIS FIKIH *SIYASAH TANFIDHIYAH* TERHADAP PENERAPAN
PROGRAM APLIKASI KLAMPID NEW GENERATION DALAM
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

Oleh

SOPHIA RAHMA SARI ANWAR

NIM. 05020422050



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sophia Rahma Sari Anwar
NIM : 05020422050
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Analisis Fikih *Siyasah Tanfidhiyah* terhadap Penerapan Program Aplikasi Klampid New Generation dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 15 Desember 2025

Yang menyatakan,



Sophia Rahma Sari Anwar
NIM. 05020422050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sophia Rahma Sari Anwar

NIM : 05020422050

Judul : Studi Analisis Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Program
Aplikasi Klampid New Generation Dalam Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 24 November 2025
Pembimbing,



Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sophia Rahma Sari Anwar

NIM. : 05020422050

Judul : Analisis Fikih Siyash Tanfidhiyah Terhadap Penerapan Program Aplikasi Klampid New Generation Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Achmad Yasin, M. Ag.

NIP. 196707271996031002

Penguji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.

NIP. 196803292000032001

Penguji III

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008

Penguji IV

M. Pasca Zakky Muhajir Ridliwan S.H., M.H.

NIP. 199205142025051001

Surabaya, 12 Januari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Huseinah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sophia Rahma Sari Anwar
NIM : 05020422050
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Jurusan Hukum Publik/Prodi Hukum Tata Negara
E-mail address : sophia.rahma26@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Fikih *Siyasah Tanfidhiyah* terhadap Penerapan Program Aplikasi Klampid New Generation dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Januari 2026

Penulis

Sophia Rahma Sari Anwar

ABSTRAK

Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Klampid New Generation (KNG) merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Perda Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai masalah, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan akses jaringan, serta pemahaman yang belum seragam mengenai prosedur layanan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi aplikasi KNG di Kelurahan Semolowaru, Nginden Jangkungan, dan Medokan Semampir berdasarkan Perda Kota Surabaya, serta bagaimana implementasinya ditinjau dari prinsip-prinsip *Siyāsah Tanfīdhiyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses pelayanan di Kecamatan Sukolilo, serta wawancara dengan aparat kelurahan, RT/RW, tokoh masyarakat, dan pengguna aplikasi. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, karya akademik, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk menilai implementasi kebijakan berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2019 dan perspektif *Siyāsah Tanfīdhiyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi KNG sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah diimplementasikan di Surabaya yang mencakup juga ketiga kelurahan sebagai sarana digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan secara umum sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh ketimpangan literasi digital, kendala teknis, dan infrastruktur pelayanan yang belum optimal. Dalam perspektif *Siyāsah Tanfīdhiyah*, implementasi KNG mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan karena pelayanan menjadi lebih terbuka, mudah diakses, mengurangi potensi maladministrasi, dan memberi kemanfaatan bagi masyarakat, meskipun pemerataan akses masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Kota Surabaya memperkuat implementasi aplikasi Klampid New Generation (KNG) melalui peningkatan literasi digital, pendampingan berkelanjutan, perbaikan infrastruktur, sosialisasi, serta penguatan keamanan data, transparansi, dan evaluasi berkala sesuai regulasi; sementara itu, kecamatan, kelurahan, dan operator diharapkan menyelaraskan standar pelayanan digital, melakukan pengawasan rutin, memfasilitasi infrastruktur, meningkatkan pendampingan warga, sosialisasi lokal, pemeliharaan sarana, serta menyediakan kanal pengaduan dengan menjunjung prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan agar layanan digital lebih efektif dan inklusif.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Landasan Teori	14
H. Definisi Operasional	18
I. Metode Penelitian	22
BAB II REGULASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH MENURUT FIKIH <i>SIYĀSAH</i>	30
A. Teori Fikih <i>Siyāṣah</i>	30
1. Definisi dan Ruang Lingkup Fikih <i>Siyāṣah</i>	30

2. Prinsip-Prinsip Dasar Fikih <i>Siyāsah</i> (<i>al-‘adl, al-amānah, al-maṣlahah</i>).	32
3. Konsep <i>Wilāyatul Imāroh</i> (الْوَلَايَةُ وَالْإِمَارَةُ).....	36
4. Konsep Fikih <i>Siyāsah Tanfīdhiyah</i>	38
B. Teori Hukum Positif	43
1. Pengertian Teori Hukum Positif.....	43
2. Hierarki Norma dalam Sistem Hukum Indonesia	45
3. Penerapan Teori Hukum Positif terhadap Implementasi Peraturan Daerah... ..	47
C. Konsep <i>Good governance</i>	49
1. Pengertian dan Prinsip-Prinsip <i>Good governance</i>	49
2. <i>Good governance</i> dalam Pemerintahan Daerah	50
3. Penerapan Prinsip <i>Good governance</i> terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Digital	52
D. Konsep Pelayanan Publik	54
1. Pengertian Pelayanan Publik dalam Hukum Administrasi Negara	54
2. Standar dan Unsur Pelayanan Publik	56
3. Penerapan Konsep Pelayanan Publik terhadap Aplikasi Klampid New Generation	58
E. Konsep <i>E-government</i> dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	60

BAB III IMPLEMENTASI APLIKASI KLAMPID NEW GENERATION (KNG) TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2019 DALAM DIGITALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 65

A. Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Bidang Administrasi Kependudukan	65
1. Dasar hukum dan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan	65
2. Perkembangan Inovasi Administrasi Kependudukan di Kota Surabaya Sebelum dan Sesudah Terbitnya Perda No. 6 Tahun 2019.....	69

3. Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung pelaksanaan aplikasi Klampid New Generation	72
B. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 sebagai Dasar Hukum Pelaksanaan Aplikasi KNG	74
1. Substansi utama Perda No. 6 Tahun 2019 yang terkait dengan digitalisasi administrasi kependudukan	74
2. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam Implementasi Perda Melalui KNG	77
C. Pelaksanaan Aplikasi Klampid New Generation di Kota Surabaya	79
1. Pengembangan dan mekanisme penggunaan aplikasi Klampid New Generation	79
2. Bentuk implementasi aplikasi KNG sebagai pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2019	83
3. Koordinasi dan keterlibatan Kecamatan serta Kelurahan dalam pelaksanaan aplikasi KNG	85
D. Implementasi Aplikasi Klampid New Generation (KNG) terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 pada Tiga Kelurahan Lokasi Penelitian	87
1. Pelaksanaan layanan administrasi kependudukan digital di Kelurahan Nginden Jangkungan	87
2. Pelaksanaan layanan administrasi kependudukan digital di Kelurahan Medokan Semampir	90
3. Pelaksanaan layanan administrasi kependudukan digital di Kelurahan Semolowaru	92
4. Perbandingan hasil implementasi aplikasi KNG di ketiga lokasi penelitian	94

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI KLAMPID NEW GENERATION (KNG) BERDASARKAN PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2019 DAN PERSPEKTIF *SIYĀSAH* SYARIYYAH..... 98

A. Analisis Implementasi Layanan Aplikasi KNG Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019	98
B. Analisis Implementasi Layanan Klampid New Generation (KNG) Berdasarkan Prinsip <i>Siyāсах Tanfīdhiyah</i>	108

1. Implementasi Aspek Keadilan (العدالة) dalam Pemerataan Pelayanan	108
2. Implementasi Amanah (الأمانة) oleh Petugas Kelurahan dan Disdukcapil.....	110
3. Implementasi Kemaslahatan (المصلحة) Layanan Digital bagi Masyarakat.....	113
4. Kesesuaian Implementasi KNG dengan Prinsip <i>Wilāyah al-Imārah</i> (Kewenangan Pemerintahan)	115
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	127
BIOGRAFI PENULIS	133

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Piramida Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	46
Gambar 2. Tampilan Menu Layanan pada Aplikasi Klampid New Generation	70
Gambar 3. Bagan Alur Tata Cara Penggunaan Aplikasi Klampid New Generation	81



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimli. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edited by Tarmizi. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bank, The World. *Governance and Development*. Washington: The World Bank, 1992.
- Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, and Moch. Juli Pudjioo. *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Edited by Evi Ariyani and Mohamad Tohari. Solo: Kafilah Publisher, 2018.
- Fatmawati. *Fikih Siyāsah*. Edited by Muhammad Shuhufi. Gowa: Pusaka Almaida, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kamma, Hamzah, Mahrida, Moh. Mujibur Rohman, Mohammad Hendry Musthofa, Mohammadong, M. Aris Rofiqi, Fauzi, et al. *Fiqh Siyāsah: Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Karso, A. Junaedi. *Buku Ajar Good Governance*. Edited by Alviana C. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.
- Lessig, Lawrence. *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books, 1999.
- Pane, Erina. *Legal Drafting*. Lampung: Harakindo Publishing Hak, 2019.
- Paramitha, Amelia Ayu, Ibnu Sam Widodo, Fakhry Amin, Muhammad Fajar, Sidiq Widodo, Hutrin Kamil, Mohamad Hidayat Muhtar, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Anik Iftitah. Kab. Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Ridwan, Juniarso. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Cetakan VI. Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.
- Sadar. *E-Government (Konsep, Implementasi Dan Evaluasi E-Government Di Indonesia)*. Edited by Handarini Rohana. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Santoso, Aris Prio Agus, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, and Rina Arum Prastyanti. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.
- Suryaningsi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University PRESS, 2018.
- Tutik, Titik Triwulan, and Ismu Gunandi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Edited by Abdul Aziz. Cetakan ke. Jakarta: Prenaamedia Group, 2016.

Zulfikar, Dra Rozaili, and Ricky Muliawan Hansyar. *Kebijakan Implementasi Administrasi Kependudukan Di Indonesia*. Edited by Darmawan Edi Winoto. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.

SKRIPSI

Ismira. “Konsep Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Skripsi* (2017).

JURNAL

Ardelia Nur Si, and Diana Hertati. “Inovasi Aplikasi Klampid New Generation (KNG) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya.” *Journal of Governance Innovation* 5, no. 2 (2023): 193–209.

Arliati, Novi, Halisatul Muslimah, Muh Albar, and Kurniati. “Penerapan Alqawaid Alfihiyyah Dalam Konteks Kehidupan Modern.” *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* 8, no. 7 (2024): 872–879.

Arquitectura, Energía Y, Tulo I Introducci, Tulo Iv, L A S Teatinas, Tulo V I I Conclusiones, Perspectivas D E U S O Contemporáneo, Tulo V Evaluaci, et al. “Filsafat Hukum Islam.” *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 2015.

Asma, S N. “Kedudukan Fiqh *Siyāsah* Dalam Hukum Islam.” *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum ...* 1, no. 2 (2024): 32–37. <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/269>.

Azizah, Amelia Katri, Isna Nur Maulida Saputri, and Muhammad Yusuf. “Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi.” *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* 3, no. 2 (2022): 120–129.

Azzahra, Risma Dhiza, and Gading Gamaputra. “Analisis Penerapan Aplikasi Klampid New Generation (KNG) Dalam Mempermudah Pelayanan Kependudukan Masyarakat Kota Surabaya (Studi Kasus: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya).” *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)* 1, no. 3 (2023): 628–641.

Fanggi, Prandy A L. “Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram* 1, no. 2 (2025).

Firdaus, Andrew Baihaqi, and Mei Retno Adiwaty. “Sistem Klampid New Generation (KNG) Secara Mandiri Dalam Mengentaskan Permasalahan Pengurusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Surabaya.” *Masyarakat Mandiri: Jurnal Pengabdian dan Pembangunan Lokal* 1, no. 3 (2024): 80–84.

Fitria, Laila Ainun. “Klampid New Generation (KNG) Sebagai Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan Ujung.” *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 21, no. 2 (2023): 111–121.

- Gultom, Ferdi, and Fransiscus Xaverius Sri Sadewo. "Adopsi Inovasi Klampid New Generation (KNG) Pada Masyarakat Karah." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu SiOSial (SNIIS)* 1 (2022): 137–147.
- Hakim, Muhammad Naufal. "Hirearki Peraturan Perundang-undangan Indonesia English Title: Hierarchy of Indonesian Legislation." *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 1 (2024): 148–154.
- Hendrik Mezak, Meray. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review* 5, no. 3 (2006): 85–97.
- Herawaty, Andi, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Universitas Negeri Makassar, Penulis Koresponden, Fikih *Siyāsah*, Pejabat Eksekutif, and Politik Islam. "Konsep Amanah Dalam Perspektif Fikih *Siyāsah* : Implikasinya Terhadap Perilaku Pejabat Eksekutif." *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* XX, no. April (2025): 77–84.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun." *Ad-daulah* 10, no. 2 (2021): 123–137.
- Laurens, Samson, and Jodi Salauddin. "Implementasi Konsep Smart City Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perkotaan." *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 11 (2024): 13130–13137.
- Lubabul Chadziq, Achmad. "Telaah Kitab Al-Mustashfa Dan Masalah Mursalah Al-Ghazali." *Equality Journal of Gender Child and Humanity* 2, no. 1 (2024): 12–29.
- Mozin, Sri Yulianty, Lina Syafitri, and Yasifah Tri Lewana. "Standar Pelayanan Publik Sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah." *Journal Central Publisher* 3, no. 4 (2025): 415–421.
- Nasution, Muhammad Hasan, Faisar Ananda, and Nurasiyah. "Justice in The Maqashid Approach Al-Syari'ah." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 12, no. 02 (2025): 1–20.
- Nudia Alfianti, and Kalvin Edo Wahyudi. "Efektivitas Aplikasi Klampid New Generation (KNG) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Wonokusumo." *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2024): 713–730.
- Nursyamsi, Fajri. "Pengawasan Peraturan Daerah Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Regional Government Pengawasan Peraturan Daerah A." *Jurnal ilmu Hukum PJIB* 2, no. 3 (2015): 523–540.
- P, Samuel Jeffirio S, and Titik Djumiarti. "Inovasi Klampid New Generation (KNG) (KNG) Di Kelurahan Jajartunggal Kecamatan Wiyung Surabaya (Studi Inovasi Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan) Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro" (n.d.): 1–17.

- Pradana, Dhani, and Budi Prabowo. "Optimalisasi Kinerja Aplikasi Klampid New Generation (KNG) Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Di Kelurahan Gundih Kota Surabaya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri (JPMM)* 2, no. 02 (2024): 129–133.
- Pratiwi, Saskia Firina, Lano Alvin Zalukhu, Aulia Rahma Tesa, Iqra Syahadatul Aisyah, and Boni Saputra. "Implementasi Digital Pada Tata Kelola Administrasi : Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Di Era Birokrasi Modern." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* 2, no. June (2025): 38–44.
- Rahmadani, Ghea Devi, and Ainur Rochmania. "Analysis of the Klampid New Generation (KNG) Application for Adminduk Services for the Surabaya City Goverment" (2020): 1–7.
- Ranita, Katarina Meira Ivana, and Ni Putu Anik Prabawati. "Efektivitas Program Klampid New Generalition Dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Klurahan Wojeckerto Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya." *Dinamika: jurnal ilmiah ilmu administrasi negara* 11, no. 1 (2024): 175–183.
- Rizman, Iksir Alkholy, Saipul Umami, and Riki Andika Putra. "Penerapan Prinsip Fiqih *Siyāsah* Dalam Kepemimpinan Modern : Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer." *De Quality: Jurnal Hukum dan Sosial Volume* 1, no. 1 (2025): 27–33.
- Rodiyah. "Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 144–152. <https://media.neliti.com/media/publications/4633>.
- Rosyidi, Muhammad, and Mahmuji. "Penerapan Fiqih *Siyāsah* Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 65–76.
- Samekto, FX. Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1.
- Saputra, Wawan Nova, Ipah Ema, Indah Nurmala Sari, and Qaulis Tsabit Ramadhani. "Trasformasi Birokrasi Digital Dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Penerapan E- Government." *Jurnal Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora (Sosiera)* 3, no. 2 (2024): 82–94.
- Setiawan, Adam, and Rezky Robiatul Aisyiah Ismail. "Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme." *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 485–508.
- Shabihah, Sierra Aulia, Mochammad Ryanindityo, and Intan Nurkumalawati. "The Role Of E-Governance As An Instrument To Enhance Government Transparency And Accountability In Indonesia." *Journal Of Administration and International Development* 5, no. 1 (2025): 45–54.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dalam Metode Meneliti Hukum." *Flat Justia Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 1–21.

Subekti, Nanang, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, and Arief Hidayat. "Konstitusionalisme Digital Di Indonesia: Mengartikan Hak Dan Kekkuasaan Di Era Digital." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 1–22.

Tiya, Siti Rahma, and Darius Antoni. "Pengembangan Konsep *E-government* Syariah Berbasis Fiqih *Siyāsah*." *Journal of Information Technology Ampera* 1, no. 3 (2020): 155–172.

Zuliah, Azmiati, and Mhd. Asri Pulungan. "Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia." *Law Jurnal* 1, no. 1 (2020): 32–42.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 jo. Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

DATA ELEKTRONIK

Tunardy, Wibowo Tjokro. "Positivisme Hukum : Aliran Hukum Positif Analitis Dan Aliran Hukum Murni." Accessed October 9, 2025. <https://jurnalhukum.com/positivisme-hukum/>.

Grafik Pertumbuhan Penduduk Kota Surabaya." *Badan Pusat Statistika, Semester I 2025, Akses 15 Agustus 2025*.

WAWANCARA

Sugiyana, Staf Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kelurahan Medokan Semampir, Wawancara, Medokan Semampir, 23 Oktober 2025

Fitria Puspitawati, Staf Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kelurahan Nginden Jangkungan, Wawancara, Nginden Jangkungan, 13 Oktober 2025.

Ketua RW Nginden Jangkungan, Ketua RW, Wawancara, Nginden Jangkungan, 12 Oktober 2025.

Okky, Staf Magang Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Semolowaru, Wawancara, Semolowaru, 23 Oktober 2025.

Wakil RT Nginden Jangkungan, Wakil RT, Wawancara, Nginden Jangkungan, 13 Oktober 2025.

Warga Kelurahan Medokan Semampir, Ketua RT, Wawancara, Medokan Semampir, 13 Oktober 2025.

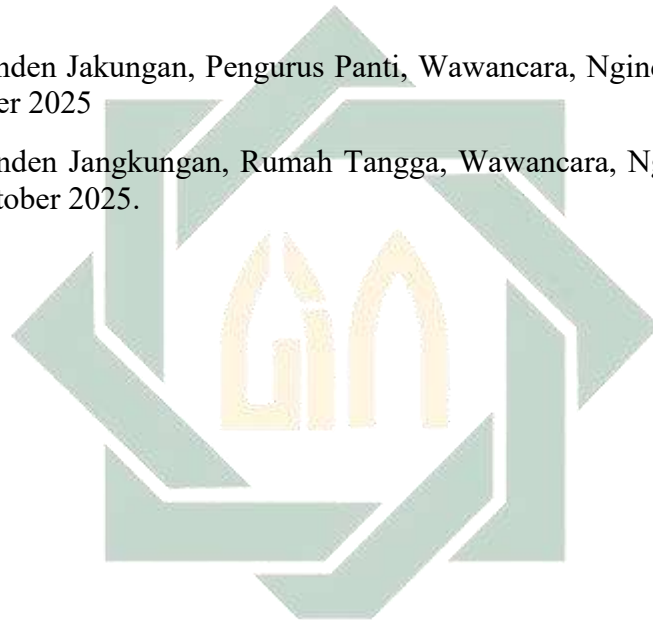
Warga Kelurahan Medokan Semampir, Ketua RW, Wawancara, Medokan Semampir, 13 Oktober 2025.

Warga Kelurahan Semolowaru, Ketua RT, Wawancara, Semolowaru, 13 Oktober 2025

Warga Kelurahan Semolowaru, Ketua RW, Wawancara, Semolowaru, 13 Oktober 2025

Warga Nginden Jakungan, Pengurus Panti, Wawancara, Nginden Jangkungan, 15 Oktober 2025

Warga Nginden Jangkungan, Rumah Tangga, Wawancara, Nginden Jangkungan, 13 Oktober 2025.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A